

# MENGGAGAS PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH

Hamdan  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan IAIN Mataram  
Email: hamdansiraj@gmail.com

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak setiap insan Indonesia dan undang-undang menjamin itu, termasuk anak kelompok masyarakat ekonomi rendah (warga miskin). Untuk itu, anak sebagai aset bangsa perlu diberdayakan dan diberi pengetahuan yang cukup agar kelak mampu menata dirinya dan daerahnya. Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak kelompok masyarakat ini sebagian besar tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Solusi dari permasalahan untuk para pengambil kebijakan adalah: (1) Menyelenggarakan sistem pendidikan secara lokal, (2) Mengembangkan model-model pendidikan pada tiap kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu, (3) Meningkatkan daya tampung pendidikan, (4) Meningkatkan sarana pembelajaran, (5) Memberikan beasiswa (6) Menyelenggarakan sekolah berasrama, dan (7) Menyelenggarakan sistem pengamanan di sekolah.

**Kata Kunci:** *Masyarakat Miskin, Pendidikan.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, kultural, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional ini memunculkan dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan kebijakan pendidikan yaitu paradigma Fungsional dan Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat bahwa peranan pendidikan dalam pembangunan adalah (1) mengembangkan potensi individu, (2) kompetensi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (3) secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat. Dengan makin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan, akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

John C. Bock dalam *Education and Development: A Conflict Meaning* seperti yang dikutip Zamroni (2003: 2) mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai berikut: (1) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (2) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan (3) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Melihat begitu pentingnya peran pendidikan, maka setiap warga negara perlu mendapatkan pendidikan agar kelak mampu memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, akan memudahkan setiap warga untuk bekerja dan meningkatkan kemampuannya dalam beraktivitas terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh insan Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 c yakni mengatur tentang setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi segenap warga negara untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, termasuk pendidikan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin).

Pendidikan bagi kelompok masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan/ekonomi rendah (miskin) perlu segera mungkin ditangani karena akan berdampak pada berbagai hal diantaranya ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola hasil bumi sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat rendah. Kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan yang dicanangkan pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2002, dan telah berjalan baik namun belum mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kemiskinan secara nasional yakni sebesar 17,75%.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat, terutama putera-puteri masyarakat berpenghasilan/ekonomi rendah atau masyarakat kelas bawah (populis). Masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah mereka yang tergolong masyarakat miskin. Anak-anak masyarakat miskin sebagian besar tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan lebih fatal lagi mereka sampai putus sekolah. Padahal bersekolah itu penting bagi mereka agar kelak dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan membantu orang tua yang pendidikannya rata-rata hanya sampai jenjang Sekolah Dasar.

Anak merupakan aset bangsa yang perlu diberdayakan dan diberi pengetahuan yang cukup agar dapat mengelola daerahnya masing-masing dengan sebaik mungkin. Untuk itu perlu ditelusuri akar penyebab utama ketidakmampuan anak-anak keluarga masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar dapat memberikan masukan (*input*) kepada pemerintah dalam penanganan masalah tersebut. Dengan tertanganinya permasalahan masyarakat miskin ini tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas masyarakat dan daerah, karena makin banyak sumber daya handal yang tercipta sehingga mampu menggunakan teknologi dalam mengolah hasil bumi. Hasil bumi yang diperolehpun akan dapat bersaing dipasaran berkat kualitas produksi yang dihasilkan.

Masyarakat miskin di sini merupakan masyarakat dengan pekerjaan terbesar adalah petani dan buruh. Sebagai petani, mereka ada yang mengolah lahan milik sendiri dan ada juga yang mengolah atau mengerjakan lahan orang lain dengan perhitungan bagi hasil. Sebagai buruh, mereka ada buruh di bidang bangunan dan ada juga dibidang pertanian yang secara rata-rata penghasilannya rendah. Masyarakat ekonomi rendah/miskin ini sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sampai tidak tamat SD dan tamat SD. Hal ini mengakibatkan pengetahuan mereka dalam mengolah lahan kurang optimal. Imbas dari semua ini nampak pada pendapatan masyarakat yang sebagian besar kurang dari Rp.20.000,-perhari. Hal ini diperburuk pula oleh jumlah tanggungan keluarga yang sebagian besar memiliki tanggungan yang lebih dari tiga orang. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa anak masyarakat ekonomi rendah/miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain data faktual tentang keadaan fisik keluarga masyarakat miskin yang terjaring, unsur-unsur lain yang di duga turut berperan adalah unsur (1) motivasi

orang tua menyekolahkan anak, (2) daya juang orang tua, (3) kecemasan orang tua, (4) pengaruh lingkungan keluarga, dan (5) sosial/masyarakat.

Dari kelima unsur atau aspek di atas memperlihatkan bahwa motivasi orang tua masyarakat miskin sangat tinggi. Motivasi yang sangat tinggi ini seharusnya berimbang pada pemenuhan kesempatan anak-anak mereka untuk mengesampingkan pendidikan yang lebih tinggi, namun karena motivasi ini didukung oleh pendapatan, pekerjaan dan tanggungan yang banyak mengakibatkan warga miskin ini tidak mampu memenuhi keinginan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tingginya pengeluaran keluarga ini menggambarkan bahwa usaha atau pekerjaan yang ditekuni selama ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga masing-masing. Karena itu pemerintah dalam hal ini dinas yang terkait kiranya perlu meningkatkan upaya dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan lebih menggiatkan penyuluhan dengan pendekatan yang sesuai kondisi lingkungan masyarakat. Sedangkan tingginya tanggungan keluarga masyarakat miskin menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membatasi kelahiran masih perlu ditingkatkan. Untuk itu pada pihak yang terkait perlu kiranya lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya membatasi kelahiran demi kesejahteraan keluarga dengan pendekatan yang sesuai kondisi masyarakat.

Selain faktor motivasi dan daya juang yang memberikan andil dalam pemenuhan keinginan masyarakat miskin menyekolahkan anak-anak mereka, faktor kecemasan perlu juga diperhatikan. Pada daerah-daerah yang terisolir, jauh dari sarana layanan pendidikan, orang tua cenderung merasa cemas menyekolahkan anak karena faktor keamanan. Sedangkan pada daerah-daerah yang dekat dengan sarana pendidikan, daya juang orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua dituntut selain memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, namun hendaknya juga memenuhi kebutuhan pendidikan yang relatif mahal dibandingkan dengan biaya pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab kecenderungan anak masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan, kecenderungan melibatkan anak-anak usia sekolah membantu orang tua mencari nafkah menjadi faktor dominan lingkungan yang menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Desakan kebutuhan mengharuskan anak usia sekolah untuk membantu orang tua dalam aktivitas usaha dan kegiatan rumah tangga.

## **B. Pendidikan Alternatif Untuk Anak Marginal**

Anak marginal memiliki kehidupan dengan pola perilaku yang berbeda dibandingkan dengan anak yang tumbuh dalam lingkungan sehat lainnya. Nilai hidup yang mereka peroleh berasal dari pola relasi lingkungan yang cenderung tidak menguntungkan. Banyak faktor pemicu yang dapat membentuk karakter anak marginal yang miskin dari nilai-nilai hidup, seperti lingkungan jalanan yang keras dan bebas bagi anak jalanan. Faktor kemiskinan struktural telah merampas sebagian kehidupan anak untuk bekerja, yang menyebabkan terhambatnya perkembangan jasmani dan rohani mereka.

Anak marginal memiliki hak untuk tumbuh kembang dengan baik, sehingga melalui pendidikan alternatif diharapkan dapat sebagai langkah awal menuju masa depan mereka. Kurniyati (2008) menawarkan tiga pendidikan alternatif yang tepat untuk anak marginal, yaitu:

1. Pendidikan karakter yang berakar pada konsep etis spiritual dan pembentukan nilai-nilai hidup.

Manusia memiliki kemampuan IQ (kecerdasan formal), EQ (kecerdasan olah rasa), SQ (kecerdasan agama dan moral) dan AQ (kecerdasan daya juang). Kecerdasan agama dan moral akan melahirkan anak yang tahu akan norma masyarakat dan tumbuh menjadi pribadi yang mengenal etika masyarakat. Kecerdasan adversitas menuntut anak untuk berpikir ke masa depan. Bagaimana ia memiliki kecakapan hidup yang tangguh, berani dan teguh dalam memperjuangkan nasibnya untuk perbaikan hidupnya. Kecerdasan emosi membuat anak sadar diri akan kekurangan dan kelebihannya. Ketiga kecerdasan itu jika digabung dengan kecerdasan intelegensi akan melahirkan rumusan pembelajaran yang tepat bagi pembentukan karakter anak marginal.

2. Pendidikan partisipatoris yang melibatkan secara aktif masyarakat komunitas marginal.

Peran orang tua banyak dilibatkan dengan menumbuhkan kesadaran pada awalnya. Menyelenggarakan semacam "*home schooling*" dengan memberdayakan orang tua yang ada. Mereka bisa mengajar bergiliran dan anak-anak merasa beruntung dapat mengenyam pendidikan dengan harga yang murah.

3. Kebijakan pemerintah yang menganggarkan APBN sebesar 20% untuk pendidikan.

Ada kepedulian pemerintah untuk memberikan porsi anggaran untuk pendidikan anak marginal. Peluang untuk mengikuti ujian kesetaraan paket A, B dan C merupakan peluang untuk anak marginal bisa sejajar dengan anak yang lain. Beberapa solusi di atas, jika melibatkan masyarakat komunitas marginal secara baik, setidaknya akan meringankan atas ketidakmampuan pemerintah untuk menangani permasalahan pendidikan kita.

### C. Solusi Masalah Pendidikan Anak Miskin

Beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengentaskan masyarakat miskin dan kurang beruntung telah banyak dilakukan sejalan dengan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan di segala bidang. Untuk meningkatkan motivasi orang tua menyekolahkan anak perlu dilakukan hal-hal berikut:

Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan secara lokal sehingga *output* nya dapat langsung mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungan tempat tinggal.
2. Mengembangkan model-model pendidikan untuk tiap kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu.
3. Melibatkan masyarakat/orang tua dalam setiap pengambilan kebijakan sekolah, tidak terbatas pada pengurus perwakilan orang tua atau komite.
4. Meningkatkan daya tampung pendidikan sehingga dapat memberikan peluang berkompetisi bagi siswa yang berasal dari pelosok negeri.
5. Menyelenggarakan manajemen pendidikan secara demokratis, transparan, efisien, dan *accountable* serta mendorong partisipasi masyarakat.
6. Meningkatkan sarana pembelajaran yang lebih memungkinkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas.
7. Membentuk asosiasi atau organisasi orang tua siswa yang secara organisatoris menjembatani kepentingan sekolah dan orang tua serta tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan proyek sekolah.

Untuk meningkatkan daya juang orang tua menyekolahkan anak perlu dilakukan hal-hal berikut.

1. Mengembangkan kebijakan yang secara nyata mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (miskin).

2. Melakukan kampanye pendidikan dengan menampilkan tokoh-tokoh yang berasal dari warga masyarakat berpenghasilan rendah yang telah berhasil dan berasal dari daerah tempat kampanye.
3. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu.
4. Sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya pendidikan bagi peningkatan kemampuan pengetahuan anak.
5. Untuk mengurangi kecemasan orang tua dalam menyekolahkan anak dapat dilakukan dengan hal-hal berikut :
  - a. Menyelenggarakan sistem pendidikan atau sekolah berasrama di daerah-daerah terpencil terutama yang jarak antara sekolah dan rumah siswa relatif jauh.
  - b. Memberikan informasi berimbang terhadap kasus-kasus kekerasan dan amoral yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - c. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat dipercaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
  - d. Menyelenggarakan sistem pengamanan di sekolah.

#### **D. PENUTUP**

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan keluarga dan sosial terkait erat dengan penyelenggaraan sistem pendidikan yang dapat melakukan proteksi dini terhadap hal-hal yang merusak moral anak seperti tawuran, pelecehan seksual, dan sebagainya perlu dilakukan hal-hal berikut.

1. Melakukan kampanye moral melalui media visual seperti radio, pemutaran film-film yang dapat dilakukan sebulan atau dua bulan sekali.
2. Menyediakan bahan bacaan, misalnya melalui perpustakaan keliling yang dapat dilakukan seminggu atau dua minggu sekali.
3. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang rata-rata masih rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga perlu dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang cara mengolah lahan dengan pendekatan yang sesuai kondisi lingkungan tempat tinggal kelompok masyarakat miskin tersebut.
4. Untuk mengurangi jumlah tanggungan keluarga yang mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran masih tinggi dapat diupayakan dengan memberikan

penyuluhan yang intensif tentang pentingnya warga masyarakat miskin menata keluarga dari segi kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ikanubun, Yoseph E. 2008. *Sekolah Unggulan versus Kaum Marginal, Catatan Reflektif tentang Kondisi Dunia Pendidikan*, Buku Obor, Jakarta.
- Isjoni, 2006. *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, Buku Obor, Jakarta.
- Redaksi Kawan Pustaka. 2005. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Susunan Kabinet RI Lengkap (1945 – 2009)*, Jakarta: PT Kawan Pustaka.
- Sismanto. 2007. *Mengeliminir Kapitalisasi Pendidikan* (<http://www.mkpd.wordpress.com>, diakses 21 september 2012)
- Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung*, Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos RI, Jakarta.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2003.